

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Etos Politik Manusia Modern

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Syukur, Yanuardi
Publisher	Faculty of Art and Culture, Al Khairun University, Ternate
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-06-12 00:46:31
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/221968

Etos Politik Manusia Modern

Yanuardi Syukur

(Dosen Antropologi Sosial, Universitas Khairun)

Abstract

The phenomenon of Indonesian politics could not complete if it's not studied in the perspective of political ethos. Indonesia often regarded as part of the east which is gentleness, helpful-person, but in the other hand some research about the personality ethos of Indonesian that is predicted by Mochtar Lubis in 1977 described Indonesia as a nation of: 1. the hypocritical, 2. disinclined and irresponsible for the actions, decision, though, and etc, 3. the spirit of feudalism that embodied in the behavior of feudalism, 4) believe in superstition, artistic, and 5) weak in character. The version of Mochtar Lubis about the basic characteristics of Indonesian still need to be studied and even debatable, because people can change anytime. Psychologist, Sarlito Wirawan Sarwono mention some of the characteristics was more appropriate as "personality profile", meanwhile in anthropology, the characteristics can be called as an "ethos" or "special trait" from a community as a study of Ruth Benedict (1962) about ethos in a book entitled Pattern of Culture.

This study is trying to analyze the thinking of Mochtar Lubis in 1977 which at some part still show about the similarity and be related to how Indonesian people based on anthropologist Koentjaraningrat. The study concern with these two Indonesian writers (a senior journalist and an anthropologist). It will make a typology about how politic ethos of Indonesian people. Thus, several of politic phenomenons such as "kutu loncat" from one party to another party, money corruption simultaneously, inconsistent in saying and action (during the campaign and has won the election) will be understandable. The next is, our knowledge about this politic ethos will be useful at least in two things: (1) academic and, (2) practical. Academically, this study is expected can be a reference and an interesting study in the field of sociology politic, anthropology of politic or psychology of politic and practically this study is also useful for the policy makers in both of government or a political party.

Keywords : *politic ethos, cultural politics, Indonesian people*

Pengantar

Etos budaya orang timur dan barat kerap diposisikan secara bertolak-belakang, berlawanan. Barat kerap digambarkan berpikiran rasional (jauh dari mistik), terbuka, superior, sedangkan timur digambarkan berpikiran mistik, tertutup, dan inferior. Gambaran sederhana ini melanda terutama ketika bangsa Barat berhasil menjelajahi samudera dan menaklukkan bangsa-bangsa di timur (termasuk *reconquista* terhadap Islam). Akibatnya kemudian, setelah bangsa-bangsa timur merdeka, tak jarang yang terbawa-bawa dan menganggap bahwa barat lebih superior, masuk akal, *trendsetter*, kiblat, dan harus diikuti. Maka, berbagai paradigma barat pun diikuti, walau pada kenyataannya tidak semua paradigma barat relevan dengan kebutuhan bangsa timur. Dalam tulisan sederhana ini, penulis mencoba menjelaskan budaya politik orang timur (Indonesia). Kajian tentang budaya politik relevan dengan kajian antropologi politik. Dalam *Political Anthropology* (terjemahan Y.

Budisantoso dan Kata Pengantar Dr. Parsudi Suparlan), Georges Balandier (1986) menulis beberapa sub-kajian antropologi politik, diantaranya kekerabatan dan kekuasaan, stratifikasi sosial dan kekuasaan, religi dan kekuasaan, aspek-aspek negara tradisional, dan tradisi dan modernitas. Buku Balandier ini membantu dalam menjelaskan fenomena politik perspektif antropologi. Buku lain yang ditulis H.J.M. Claessen, *Politieke Antropologie, Een terreinverkenning* (terjemahan R.G. Soekadijo), menjelaskan beberapa hal penting, di antaranya politik dan alam sakral, politik dan kekerabatan, politik dan landasan material, dan evolusi sistem politik. Setidaknya, dua buku ini menjadi rujukan dalam pembahasan antropologi politik.

Lantas, apa yang dimaksud dengan budaya politik dalam tulisan ini? Dalam khazanah antropologi, budaya diartikan dengan bermacam-macam. Ada ratusan definisi tentang budaya, dan satu sama lain kerap ada pertentangan. Namun, seorang peneliti mau tak mau—dari banyaknya definisi itu—harus bisa

menentukan satu definisi yang diikutinya (setidaknya walaupun hanya sementara). Mengutip William Haviland, kebudayaan terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, dan persepsi abstrak tentang jagat raya yang berada di balik perilaku manusia, dan yang tercermin dalam perilaku. Semua itu, tulis Haviland pada bab *Hakikat Kebudayaan* dalam bukunya *Antropologi* adalah milik bersama para anggota masyarakat, dan apabila orang berbuat sesuai dengan itu, maka perilaku mereka dianggap dapat diterima di dalam masyarakat. Kebudayaan, tambah dia lagi, dipelajari melalui sarana bahasa, bukan diwariskan secara biologis, dan unsur-unsur kebudayaan (ada 7 unsur terkenal) berfungsi sebagai suatu keseluruhan yang terpadu.

Etos Manusia Indonesia Menurut Mochtar Lubis

Pada 1977, Mochtar Lubis menulis tentang ciri-ciri pokok manusia Indonesia. Setidaknya ada enam ciri manusia Indonesia, sebagaimana dikutip Amri Marzali dalam *Antropologi dan Pembangunan Indonesia* (2007: 122-125) sebagai berikut:

1. Hipokrisi (munafik). Manusia Indonesia itu kata Lubis suka berpura-pura, lain di muka lain di belakang. Faktor yang membuat mereka menjadi hipokrit adalah karena tekanan keras dari sistem pemerintahan feodal. Orang dipaksa untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya dirasakan dan dipikirkannya, karena takut akan hukuman dari penguasa yang feodalistis. Orang dipaksa untuk bersikap “asal bapak senang”, agar selalu mendapat limpahan berkah dari penguasa. Kata Lubis lagi, “Orang belajar mengatakan ‘tidak’ dengan cara-cara yang berliku-liku, diselimuti dan diberi berbagai topeng, hingga tidak dapat lagi dikenali maksudnya. Demikian pula dengan sikap tidak setuju, atau sikap mengkritik dan mencela, semuanya diselubungi, diungkapkan dengan cara yang lain.”
2. Segan dan enggan bertanggungjawab atas perbuatannya, putusnya, kelakuannya, pikirannya, dan sebagainya. Orang Indonesia cenderung untuk melepaskan tanggungjawab pada orang lain ketika ia mendapatkan masalah atau kegagalan. Biasanya yang

menjadi “kambing hitam” adalah para bawahan, mereka yang lebih muda, atau kaum minoritas. Pada faktanya, karena para bawahan, kaum muda, dan minoritas itu tidak mau juga dipersalahkan, maka terjadilah saling melempar tanggungjawab.

3. Jiwa feodalisme yang terwujud dalam perilaku feodalisme. Perilaku feodalisme ini terlihat misalnya dalam upacara resmi kenegaraan, dalam birokrasi kepegawaian, dalam pengangkatan istri atau anak sebagai pejabat pada berbagai posisi penting, dan lain-lain. Jiwa feodal ini juga dapat dilihat dari susahny seorang bawahan atau orang biasa untuk bertemu pejabat, apalagi meneleponnya. Diperlukan prosedur yang panjang dan berbelit-belit untuk bertemu seorang pejabat. Ada kesan, “makin panjang dan makin berbelit-belit jalan untuk menemuinya, maka makin tinggi kewibawaan pejabat tersebut.”
4. Percaya pada takhayul. Manusia Indonesia percaya bahwa batu, gunung, pantai, sungai, keris, dan sebagainya, memiliki kekuatan gaib, yang karena itu harus dipuja dan diberi sesajen. Manusia Indonesia, kutip Amri Marzali, “sampai sekarang, meskipun sudah berpendidikan tinggi, masih tetap percaya pada jimat dan jampi-jampi.” Juga, mereka percaya pada lambang dan semboyan yang diciptakannya sendiri.
5. Artistik. Ini ciri positif manusia Indonesia. Sejak lama ciptaan artistik manusia Indonesia telah mengisi museum-museum terkenal di Eropa. Tidak hanya di Eropa, di dalam negeri sendiri, ada banyak nuansa artistik yang masih dapat dilihat, misalnya dari patung-patung dalam berbagai candi, seni peran, berbagai musik yang saking artistiknya sampai ada beberapa yang diklaim oleh negara tetangga sebagai karya mereka sendiri dan membuat orang Indonesia baru “kebakaran jenggot” ketika klaim itu telah terjadi, dan seterusnya.
6. Watak yang lemah. Manusia Indonesia dianggap Lubis, “kurang kuat dalam mempertahankan keyakinannya.” Mereka mudah berubah keyakinan, demi menyelamatkan diri. Banyak

orang cerdas Indonesia yang rela menjual keyakinannya demi keselamatan dan kesejahteraan dirinya. Faktor yang membuat hal ini terjadi karena watak feodal “asal bapak senang.”¹

Ciri pokok manusia Indonesia versi Mochtar Lubis itu perlu dikaji bahkan diperdebatkan sisi benar-tidaknya (atau masih relevan atau tidak), karena ketika zaman berputar manusia bisa jadi berubah. Psikolog Sarlito Wirawan Sarwono menyebut beberapa ciri-ciri itu lebih tepat sebagai “profil kepribadian”, sementara itu dalam antropologi, ciri-ciri itu bisa disebut sebagai sebagai “ethos” atau “watak khas” yang dipancarkan oleh sebuah komunitas sebagaimana kajian Ruth Benedict (1962) tentang etos dalam buku *Pattern of Culture*.

Etos Manusia Indonesia Menurut Koentjaraningrat

Pendekar Antropologi Indonesia, Koentjaraningrat pernah menulis tentang mentalitas bangsa Indonesia. Bukunya *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (1974) menjelaskan tentang mentalitas bangsa Indonesia yang nampaknya masih relevan dengan kondisi sosial kita saat ini. Ada hal baik—seperti juga dalam kategorisasi Wartawan Senior Mochtar Lubis tentang manusia Indonesia—juga ada hal buruk. Mentalitas yang buruk, menurut Koentjaraningrat, ada yang sifatnya kelanjutan dari kolonialisme, juga ada karena mental asli bangsa yang berkembang sejak lama. Kasus malasnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk kantor, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (pusat dan daerah) yang lebih suka melancong buang-buang duit tidak produktif (termasuk SPPD fiktif), fakta “berpikir

¹ Selain enam ciri ini masih ada lagi ciri lainnya yang diungkap Mochtar Lubis. Beberapa ciri negatif lainnya adalah: (1) Tidak hemat, (2) Tidak suka bekerja keras, kecuali kalau terpaksa, (3) Jadi pegawai negeri adalah idaman utama, khususnya di tempat yang “basah”, (4) Suka menggerutu di belakang, tidak berani secara terbuka, (5) Cemburu dan dengki terhadap orang lain yang lebih kaya, dan (6) Sikap tidak peduli dengan nasib orang lain. Sementara itu, Lubis juga mencatat beberapa ciri positif manusia Indonesia sebagai berikut: (1) Kemesraan hubungan antarmanusia, (2) Kasih Ibu dan Bapak pada anak-anaknya, (3) Berhati lembut dan suka damai, (4) Punya rasa humor yang cukup baik, (5) Otaknya cukup encer, cepat bisa belajar, dan (6) Sabar.

sederhana” (*simple minded*), penggunaan kekerasan dalam politik, adalah bagian dari beberapa tipologi manusia Indonesia dalam politik.

Mentalitas (dalam tulisan ini menggunakan kata ‘etos’) orang Indonesia menurut Koentjaraningrat adalah sebagai berikut:

1. Meremehkan Mutu

Seorang teknisi komputer di salah satu kabupaten pernah mengatakan, “Di sini tiap minggu selalu ada komputer kantor yang rusak. Padahal rusaknya itu sedikit sekali.” Kata beliau, tiap minggu ada saja pegawai yang membawa komputer kantornya untuk diperbaiki. Ini menjadi tanda tanya, “kenapa bisa setiap minggu ada saja instansi yang bawa komputernya untuk diperbaiki? Maka, mentalitas meremehkan mutu ini bisa jadi penyebabnya. Mungkin, mereka yang menggunakan komputer itu mutunya tidak baik. Tidak paham bagaimana mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Kita juga bisa melihat mentalitas ini pada penerimaan formasi CPNS. Sudah sering kita dengar, katanya, kalau seseorang dekat dengan pejabat tertentu, maka ada saja jatah untuknya. Jadi, seorang diterima sebagai abdi negara itu karena kedekatan, bukan karena mutu. Apa efek dari penerimaan seperti ini? Kelak terlihat sekali bagaimana tidak cakupnya abdi negara seperti itu. Mentalitas yang meremehkan mutu ini sebabnya karena apa? Menurut Prof. Koen,² ini terjadi karena “kekosongan generasi di berbagai bidang kehidupan.” Mereka-mereka yang kreatif, begitu kosong di berbagai tempat. Kekosongan generasi kreatif ini bisa jadi karena masalah SDM kita yang tertatih-tatih. Beberapa daerah ingin menjadi daerah otonom baru, tapi manajemennya belum begitu baik. Mutu belum ditampakkan secara baik, kemudian ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Tentu ini perlu dipertimbangkan lebih jauh.

2. Suka Menerobos

Mentalitas suka menerobos dapat dimaknai sebagai sikap mental yang ingin mencapai suatu kedudukan dengan cara yang gampang, dan tidak mengindahkan proses alamiah. Suatu waktu ketika mengantri di mesin ATM, ketika mau masuk, tiba-tiba seseorang di belakang langsung menerobos masuk. Tampaknya lelaki itu kenal dengan orang yang sedang menarik

² Sapaan Prof. Koentjaraningrat

uang di dalam. Cara-cara yang tidak terpuji seperti itu ternyata masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat kita. Belum lagi dalam proyek di birokrasi. Seorang pimpinan salah satu partai, mengatakan seperti ini, “adakalanya, proyek-proyek itu sebenarnya tidak bisa jalan, tapi karena pakai uang, maka jadilah proyek itu.” Mendengar itu, bisa jadi betul. Untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, orang rela menyogok kiri dan kanan. Padahal, kalau kita amati secara jernih, itu termasuk perbuatan yang sangat tercela. Nurani kita pun sebenarnya tidak suka dengan perbuatan macam itu. Dalam dinamika sosial juga begitu. Berbagai kasus penyerbuan tempat ibadah, kerusakan SARA, atau main hakim sendiri, itu karena mentalitas suka menerobos ini. Hukum tak lagi menjadi sesuatu yang patut diikuti. Akhirnya, masyarakat menyelesaikan masalah-masalah sosial mereka dengan kekerasan. Padahal negeri kita rata-rata umatnya beragama. Dalam agama diajarkan untuk saling membantu, bekerjasama, berbaik sangka, dan memberikan cinta dan kasih sayang antara sesama. Ironis sekali fakta ini.

3. Tidak Percaya Diri

Mentalitas tidak percaya diri setidaknya bisa dilihat dalam acara. Rata-rata peserta yang hadir selalu maunya duduk di belakang, atau di tengah. Jarang di antara mereka yang berani untuk duduk di depan. Kalaupun sudah diminta untuk menempati posisi depan, umumnya kita lebih suka di belakang. Apa makna yang tersirat dari fakta ini? Bisa jadi, ini adalah potret dari tidak percaya diri. Mereka yang yakin dengan dirinya sendiri akan tampil prima – walaupun harus sendiri. Tapi, mereka yang serba takut – takut salah, takut dicela, dan berbagai ketakutan personal lainnya – akan berdampak pada berbagai sisi kehidupannya. Dia mau kreatif, tapi takut atasannya marah. Mau berbuat baik akhirnya tidak jadi, karena masalah psikis internal ini. Fakta ini tidak hanya melanda mereka yang berasal dari daerah pedesaan, tapi juga di kota. Dalam salah satu seminar di Jakarta, acara tidak tepat waktu karena peserta yang hadir masih bergerombol di luar, dan setelah diminta oleh moderator untuk menempati kursi bagian depan, ternyata tak juga banyak yang berminat. Rata-rata lebih suka di belakang, atau di tengah. Fakta ini kelihatannya sepele, tapi kalau diperhatikan lebih jauh, bisa jadi hal ini juga yang memberikan pengaruh pada berbagai

kelambatan kita menjadi bangsa yang maju dan besar.

4. Tidak Disiplin

Contoh paling mudah tentang mentalitas tidak disiplin ini ada di jalan raya. Masih banyak yang acuh tak acuh tidak menggunakan helm di jalan raya. Bisa jadi, mereka berkata, “ah, sekarang kan hari Minggu, polisi tidak ada!” Jadi, mereka pakai helm yang berfungsi sebagai pengaman kepala itu karena faktor ada tidaknya polisi. Sehebat Valentino Rossi sekalipun dalam membawa motor, tapi masalah keamanan haruslah diperhatikan. Ini adalah sikap berjaga-jaga jika kelak ada saja kecelakaan lalu lintas. Sebuah pepatah mengatakan, “*prevention is better than cure*” (mencegah, itu lebih baik daripada mengobati). Mentalitas ini terdapat dalam banyak sisi—dari jalan raya, birokrasi, hingga tempat-tempat ibadah. Di jalan raya, kerap ada yang tidak peduli dengan marka jalan, atau lampu merah. Di birokrasi, juga begitu. Kalau kepala daerahnya tidak di tempat, maka bermalas-malasanlah para abdi yang digaji oleh negara itu. Ketika sang kepala daerah masuk kantor, barulah satu satu pasang muka baik, taat, dengan kesan, “saya orang yang disiplin dan loyal.” Tak bisa digeneralisir memang, tapi tak bisa juga kita berpaling dari fakta yang benar-benar ada ini. Mereka yang bermental seperti ini lazimnya bertindak bukan karena kesadaran bahwa ia haruslah berkarya. Ia berkarya, bekerja, itu karena posisinya. Jadi, pekerjaan yang ia lakoni semata untuk menyelesaikan tugas saja, atau bahasa lainnya “kejar setoran.” Akhirnya pekerjaan demi pekerjaan tak ada unsur kreatifnya. Kebijakan sebuah instansi dari dulu sampai sekarang tak beranjak dari hal ini dan itu, tak lepas dari proses *copy* dan *paste*. Padahal, yang saat ini kita butuhkan demi kemajuan daerah dan bangsa ini adalah tipikal manusia Indonesia yang disiplin, dan berani membuat inovasi.

5. Mengabaikan Tanggungjawab

Abai dengan tanggungjawab itu berbahaya. Mereka yang korupsi uang negara (besar-kecilnya), jelas abai. Mereka yang menyalahgunakan wewenangnya dalam birokrasi, juga abai. Para mahasiswa yang tidak belajar sungguh-sungguh, juga abai. Para nelayan yang mendapatkan uang hasil tangkapannya kemudian dihabiskan untuk sekedar menenggak minuman keras dan tidak menyisakan kepada anak istrinya, juga jelas-jelas

abai dengan tanggungjawab. Tak terkecuali, presiden yang beberapa waktu lalu curhat bahwa gajinya beberapa tahun tidak naik-naik, kalau tidak peduli dengan penderitaan rakyat, juga ia termasuk mengabaikan tanggungjawab. Ternyata, mengabaikan tanggungjawab ini tak hanya ada di tingkatan tertinggi seperti presiden, tapi juga rakyat jelata. Seharusnya, ketika seseorang telah menyatakan sanggup untuk melaksanakan sebuah pekerjaan, maka dia haruslah bertanggungjawab atas keberhasilan pekerjaan tersebut. “Apabila perlu,” kutip Amri Marzali, “demi keberhasilan pekerjaan tersebut, dia harus sanggup mengorbankan dirinya sendiri.” Terkait masalah ini, maka baik sekali agar manusia Indonesia lebih setia terhadap satuan sosialnya. Ada kesan—dan ini juga diungkap oleh Koen—bahwa orang Indonesia itu kurang setia terhadap instansi yang diikutinya. Yang ideal adalah, seperti yang dipraktikkan oleh orang Jepang. Bagaimana modelnya? Manusia terbaik menurut orang Jepang adalah “mereka yang setia secara total terhadap kesatuan sosial, organisasi, atau instansi yang sudah dipilih untuk diikutinya” (Marzali, 2007: 136).

Lima mentalitas negatif di atas adalah turunan dari apa yang dijelaskan oleh Koentjaraningrat kurang lebih tiga puluh tahun yang lalu. Melihat kategorisasi ini, tampaknya memang benar, mentalitas bangsa kita masih belum beranjak dari kelimat mentalitas negatif itu.

Etos Politik Manusia Indonesia

Walau ciri-ciri pokok manusia Indonesia versi Mochtar Lubis dan mentalitas bangsa Indonesia menurut Koentjaraningrat di atas masih bisa diperdebatkan, tapi melihat kondisi politik Indonesia, terutama pasca reformasi 1998, tampaknya konsep Lubis dan Koentjaraningrat itu menemukan kebenarannya di masyarakat. Maka dalam tulisan ini, secara sederhana (tentu saja harus diperdalam dalam riset lanjutan) semacam ciri politik manusia Indonesia atau sebutlah itu “etos politik manusia Indonesia” dengan mengambil inspirasi kedua pakar di atas, sebagai berikut:

1. Berpikir Sederhana (*simple minded*)

Dalam *Indonesia Kita* (2003), Nurcholish Madjid menulis bahwa tak jarang bangsa luar menilai bahwa kita adalah bangsa yang berpikiran sederhana (*simple minded*). berpikir sederhana itu, menurut Cak Nur, bisa disebabkan karena

belum meratanya pendidikan. Tapi selain itu, kita disebut sebagai *simple minded*, itu karena tak jarang ditemukan gejala premanisme. Ia menulis, “...premanisme itu tidak hanya kita temukan di kalangan orang ‘pinggir jalan’, tapi juga di antara mereka yang secara formal menduduki tempat-tempat terhormat” (hal. 122). Pikiran sederhana ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan atau sikap anarkis seperti tawuran, kerusuhan dan seterusnya yang melanda bangsa. Pikiran sederhana ini juga terjadi dalam dunia politik. Sikap partai politik dengan menggandeng artis tenar yang minim pengetahuan dan pengalaman politik adalah bagian dari itu. Kenapa misalnya, pasca pemilu sebelumnya partai tidak bersibuk membuat kader yang kelak dicalonkan menjadi anggota legislatif? Atau, contoh lain, dalam arena kampanye, partai-partai berlomba-lomba untuk menghadirkan artis dangdut. Ceramah politiknya (yang sebenarnya inti) cuma beberapa menit, dilanjutkan dengan dangdutan yang memakan jam. Ini bagian dari pikiran sederhana yang melanda politik kita. Pikiran sederhana ini memang tidak bisa disalahkan seratus persen pada partai, karena “tuntutan” dan “kebutuhan” untuk bersantai-santai ria dan bersenang-senang dari massa kampanye—yang bisa jadi bukan kader partai tersebut akhirnya terjadi kampanye seperti itu. Logika itulah bisa jadi yang membuat kenapa artis dangdut harus hadir di kampanye partai.

2. Hipokrisi dan Slogan

Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa UI, di tahun 60-an pernah berkata, “Patriotisme tidak akan lahir dari hipokrisi dan slogan.” Ketika menulis makalah ini, saya tertarik menggunakan ungkapan hipokrisi dan slogan itu. Para politisi sebenarnya patriot, karena mereka sejatinya – dengan partainya – membela rakyat banyak, maka mereka adalah patriot atau pejuang. Akan tetapi, jika hipokrisi (kemunafikan) melanda, banyak fakta yang tidak sesuai pasca dan pra menduduki jabatan politik, maka ini bisa jadi masalah. Belum lagi dengan slogan-slogan “katakan tidak pada korupsi”, “kami siap mengabdikan”, “gaji saya untuk rakyat” dan seterusnya, terkesan hanyalah kamufase (kepura-puraan, topeng) yang ditampilkan untuk meraup suara, duduk sebagai wakil rakyat, dan selanjutnya adalah: lupa. Tentu saja tidak semua politisi seperti itu, akan tetapi jika diperhatikan – baik di media massa maupun dalam obrolan-obrolan santai – fakta seperti itu lebih banyak

muncul ketika membahas para politisi yang telah duduk di kursi “basah” tersebut.

3. Suka Mencari Kambinghitam

Sebuah definisi politik mengatakan, politik adalah “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.” Maka, dalam politik erat sekali hubungan dengan “mendapatkan apa.” Tentu dalam “mendapatkan apa” itu, masing-masing politisi punya cara baik baik yang legal maupun ilegal, yang konstitusional maupun yang inkonstitusional. Pemikirannya begini, “Asal tidak ketahuan, tidak mengapa. Tapi kalau ketahuan, uang korupsi itu tinggal *dibalikin* aja.” Namun, kalau korupsi politiknya itu terendus oleh instansi penegak hukum, bisa jadi akan dicari kambinghitam baik dari orang mereka sendiri atau bukan. Contoh nyata misalnya dalam kasus dana talangan Bank Century yang sampai sekarang tidak selesai-selesai, kasus Hambalang yang menyeret Nazaruddin, Anas Urbaningrum, hingga sekarang diarahkan pada Edi Baskoro Yudhoyono. Dalam politik kambinghitam, hal-hal seperti itu memungkinkan sekali terjadi. Kasus kematian Munir misalnya, sampai sekarang tidak jelas siapa otak intelektual di balik kasus tersebut, dan publik juga meragukan apakah kasus itu dilakukan murni oleh Pollycarpus seorang atau oleh sekelompok orang yang merasa terganggu dengan kiprah pendiri Kontras tersebut.

4. Hidup Mewah

Kemewahan bisa jadi dianggap sebuah kepantasan bagi seorang politisi karena berada dalam kalangan elite. Sikap mewah ini jika tidak bisa dikendalikan, akan mewabah pada istri dan anak-anak sang politisi itu. Akhirnya, karena keluarganya bermewah-mewahan, maka yang terjadi kemudian adalah, sang kepala keluarga pun “mati-matian” mencari duit untuk itu, walau dengan cara-cara yang tidak benar. Tidak semua politisi boros, tentu saja ada yang memilih hidup sederhana seperti Dr. Hidayat Nur Wahid, bahkan ada yang ke kantornya menggunakan sepeda motor dan angkutan umum seperti Mashadi. Di antara anggota DPR, ada kalangan yang sebelum duduk di parlemen adalah pengusaha dan kaya. Kemudian ada kesan bahwa kemewahan adalah hal yang wajar, bukan karena menjadi anggota DPR akan tetapi karena memang hal itu ia dapatkan dari usahanya. Center for Electoral Reform mencatat, dalam buku *Almanak Anggota Parlemen 2009-2014* yang diterbitkan

September 2010, pada Pemilu 2009 mengantarkan 60 orang pengusaha masuk parlemen atau 10,71 persen dari 560 total anggota DPR. Pekerjaan terbanyak adalah 'swasta' yang mencapai 200 orang atau 35,7 persen dari total anggota DPR. Kemudian terbanyak kedua adalah 'Anggota DPR' yakni 148 orang atau 26,4 persen. Namun pekerjaan swasta ini tak diketahui rinciannya apakah sebagai wiraswasta alias pengusaha atau karyawan swasta (*Viva News*, 16 November 2011)

5. Percaya pada Takhayul

Orang Indonesia tidak bisa dipisahkan dari mistik dan takhyul. Umumnya, hal ini terjadi di kalangan bangsa timur yang di bagian awal tulisan ini dikaitkan dengan filsafat timur yang khas mistik. Berita dari beberapa media menyebutkan bahwa ada politisi yang rela berendam di sebuah sungai untuk mendapatkan berkah dan agar menang dalam pemilihan legislatif. Juga tak jarang yang mendatangi dukun untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seorang dukun (paranormal) yang diwawancarai di televisi mengatakan bahwa kliennya banyak, dan ia beri tarif beberapa miliar sampai triliunan jika ingin jadi bupati, gubernur, menteri, atau presiden. Berita berikut ini menjelaskan fakta tersebut:

“Menjelang pemilu, “bisnis” paranormal pun semakin menggeliat. Pemicunya ya itu tadi, tak sedikit caleg memercayai kekuatan gaib bisa melanggengkan jalannya. Salah satu paranormal yang memiliki daftar klien premium adalah Ki Joko Bodo. Ia mengaku, sudah menjadi tradisi ketika menjelang pemilu, para caleg hingga calon presiden mendatangnya. Tujuan apalagi kalau bukan mencari jalan pintas mencari kemenangan.

Lain lagi dengan Ust. DR. H. Desembriar Rosyady, S.Ag, SE, SH, MM, MBA. Pria dengan sederet gelar itu enggan disebut “dukun politik”. Ia lebih suka menamai dirinya sebagai “guru spiritual politik”. Rosyady merupakan pendatang baru. Dia baru membuka jasa bantuan bagi para caleg hingga capres pada tahun ini. Sebelumnya, Rosyady mengaku lebih aktif ceramah dan mengajar mengaji untuk para pejabat. Untuk mempromosikan dirinya, Rosyady memilih cara dengan menyebarkan brosur. Di dalam brosur itu terdapat sebuah tulisan besar “Anda Ingin jadi Anggota DPD, DPRD – RI, Seluruh Indonesia atau

Walikota maupun Gubernur? Bahkan Presiden? Insyallah 100 persen pasti jadi". Brosur itu juga memuat tarif fantastis untuk jasa yang diberikannya." (*Kompas*, 20 Oktober 2013)

6. Cemburu dan Dengki

Sikap ini terjadi karena persaingan negatif dalam politik. Pada dasarnya ungkapan "tujuan menghalalkan segala cara" juga terjadi dalam politik ketika seorang politisi yang tidak senang dengan politisi lainnya, maka dibuatlah berbagai skenario untuk menjatuhkan yang lain. Kasus ketika Aburizal Bakrie (ARB) berkampanye dimana-mana sebagai Capres Partai Golkar, ia pun disudutkan sedikit demi sedikit lewat video yang diunggah di Youtube berjudul "Capres ARB bersama Artis Marcella Zalianty di Pulau Maladewa" dan blog serta akun facebook yang menyerang dirinya. Perjalanan ARB ke Maladewa bersama Marcella (dan adiknya Olivia) bersama politisi Aziz Syamsuddin itu menjadi "bola panas" untuk menjatuhkan ARB. Maka, sindiran Prabowo Subianto agar tidak memilih "presiden boneka", sebenarnya tidak semata ditujukan bagi Jokowi (Capres PDIP), akan tetapi juga buat ARB karena di video tersebut ARB sempat berfoto memeluk boneka *teddy bear*. Kenapa muncul video itu? Ya, bisa dipastikan itu strategi politik karena sifat cemburu dan dengki yang berpaut dengan anggapan bahwa politik bisa menghalalkan segala cara untuk menggapai tujuan.

7. Cenderung Mendendam

Seorang petinggi di sebuah provinsi pernah berkata bahwa politisi kita pendendam. Sikap mendendam ini terjadi karena tidak ikhlas melihat kemenangan pihak lain. Seharusnya individu yang pernah menjadi calon presiden, gubernur, atau bupati/walikota itu tetap mendukung pemerintahan yang ada, walau ia tidak menjadi bagian struktural dari pemerintahan tersebut. Dalam konteks politik Indonesia lebih luas ikhwal dendam-mendam ini juga terlihat ketika Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dicalonkan sebagai calon presiden, ada desakan dari partai-partai politik yang meminta agar Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI. Menurut Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, permintaan partai-partai politik yang meminta agar Jokowi mundur dari jabatan Gubernur DKI tak memiliki landasan. "Tidak ada aturan yang memaksa calon presiden harus mencopot jabatan yang

masih dipegangnya," kata Yunarto "Ini seperti ada dendam politik." Sebab, Yunarto menjelaskan, bila Jokowi melepas jabatannya terlebih dahulu, malah akan membuat persepsi seperti Jokowi meninggalkan amanahnya. "Itu malah akan membuat Jokowi terlihat haus jabatan," ujarnya (*Tempo*, 12 April 2014)

8. Berorientasi Partai, bukan Negara

Partai politik adalah salah satu pilar dari demokrasi, akan tetapi ketika seorang politisi menginjakkan kakinya sebagai pejabat negara, konsentrasinya beralih ke negara. Ia bukan lagi hanya berpikir bagaimana mengembangkan partainya, akan tetapi bagaimana membawa Indonesia yang majemuk multietnis ini menjadi bangsa yang besar dalam perbedaan yang ada. Ia haruslah menjadi negarawan, berjiwa besar, dan memperlikan kader-kader partai lainnya untuk menduduk jabatan di partai dan mengelola partai sebaik mungkin. Faktanya jika seorang pejabat negara masih memiliki jabatan strategis – seperti ketua umum atau presiden partai – maka konsentrasinya akan terpecah dan tidak maksimal dalam mengelola negara, dan ada ada peluang untuk memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan partai. Kritikan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menggunakan fasilitas negara saat berkampanye sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat dinilai sebagai penyelewengan fasilitas negara berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif (*Tribun News*, 28 Maret 2014).

9. Berkorban penuh Perhitungan

Politik adalah hitungan, hitungan apa saja – termasuk hitungan berapa uang yang ia keluarkan. Berapa yang dikeluarkan ketika kampanye, umumnya juga akan berusaha dikembalikannya pada saat menjadi anggota legislatif atau pejabat pemerintah. Dalam periode menjadi pejabat itu, akhirnya seorang politisi dan pejabat pemerintah akan berpikir seperti Wiro Sableng 212: Dua tahun pertama sibuk mengembalikan uangnya saat kampanye, satu tahun bekerja, dan dua tahun terakhir – sebagai petahana (*incumbent*) – sibuk kampanye untuk pemilihan selanjutnya. Jika ini yang terjadi, maka wajarlah kalau masyarakat tidak sejahtera, dan pelayanan dikeluhkan dimana-mana. Dalam berbagai pemberitaan di media massa dikabarkan bahwa para calon anggota legislatif yang gagal ada yang mengambil

kembali sumbangannya, bahkan ada sumbangan untuk masjid yang telah digunakan juga diminta kembali. Tampak di sini ada perhitungan dalam mengorban sesuatu kepada masyarakat yang bisa jadi hal itu terjadi karena sifat politik transaksional.

Sembilan etos politik yang diramu dari pendapat Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat (menurut bacaan penulis) tentu saja merupakan bahan awal untuk kajian pendalaman lebih lanjut. Satu hal yang mendekati kejelasan adalah, beberapa etos di atas memang fakta nyata adanya, namun tentu saja ini tidak berarti menggeneralisir bahwa semua politisi bersikap demikian, ini hanyalah kecenderungan umum yang mungkin perlu diteliti lebih lanjut dengan pendekatan dan kajian yang lebih dalam. *

Daftar Bacaan

Buku

- Haviland, William A. 1988. *Antropologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Lubis, Mochtar. (1992). *Budaya, Masyarakat, Dan Manusia Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Madjid, Nurcholish. (2002). *Indonesia Kita*, cet.1. Jakarta: Universitas Paramadina

Marzali, Amri. (2007). *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

Koentjaraningrat (2004). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia

Internet

- Kompas, *Paranormal pun Ikut Bertempur Jelang Pemilu 2014*, diunduh dari laman <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/20/0838163/Paranormal.Pun.Ikut.Bertempur.Jelang.Pemilu.2014>, pada 7 Mei 2014
- Tribun News, *ICW Kritik SBY Kampanye Pakai Fasilitas Negara*, diunduh dari laman <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/03/28/icw-kritik-sby-kampanye-pakai-fasilitas-negara>, pada 7 Mei 2014
- Tempo, *Desak Jowoki Mundur dari Gubernur, Ini Dendam Politik*, diunduh dari laman <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/12/269570100/Desak-Jokowi-Mundur-dari-Gubernur-Ini-Dendam-Politik>, pada 7 Mei 2014
- Viva News, *Pengusaha Mendominasi DPR*, diunduh dari laman <http://politik.news.viva.co.id/news/read/264486-pengusaha-mendominasi-dpr->, pada 7 Mei 2014